

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada 4 kawasan advokasi WALHI yaitu kawasan Perkotaan, kawasan Merapi, kawasan Menoreh dan kawasan Pesisir Selatan. Keempat kawasan memiliki permasalahan yang cukup unik dan perlu penanganan tersendiri. Dari keempat kawasan advokasi yang dilakukan oleh WALHI, menghasilkan beberapa permasalahan dan advokasi terhadap kasus-kasus yang timbul seperti:

a. Permasalahan dan advokasi kawasan Pesisir Pantai meliputi;

1). Pengkritisan Jalur Lintas Selatan. pembangunan Jalur Lintas Selatan di Yogyakarta yaitu ada 2 permasalahan yang timbul seperti, pada tingkatan pemerintah dan masyarakat. WALHI bersama masyarakat melakukan *public hearing* dengan DPRD dan pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengkritisan AMDAL terhadap pembangunan JLS melalui riset, kampanye, dan demonstrasi.

2). Pengkritisan Terhadap Pembangunan Pusat Rehabilitasi Korban Gempa. Permasalahan yang timbul seperti, proses pembangunan gedung pusat rehabilitasi ini tidak jelas siapa yang harus bertanggungjawab terhadap dokumen pengelolaan lingkungan hidupnya apakah Pemprop DIY ataukah Pemkab Bantul. Selain itu

untuk pemilihan lokasinya dinilai tidak tepat karena berada di daerah rawan bencana termasuk gempa zona 2 yaitu di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Sehingga dikhawatirkan terjadi bencana baru jika ada gempa besar. WALHI dan LBH Yogya melakukan *public hearing* dengan DPRD Bantul dan DPRD Propinsi Yogyakarta. Upaya *public hearing* ini membawa hasil yang cukup baik, DPRD Bantul dan DPRD Propinsi Yogyakarta menyatakan akan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali proyek tersebut dan melarang aktivitas pembangunan sebelum urusan / sengketa dengan warga setempat belum diselesaikan.

- 3). Penolakan Rencana Penambangan Pasir Besi di Pesisir Selatan. Permasalahannya yaitu, Pemkab Kulon Progo berpendapat bahwa Kulon Progo tidak akan bisa hidup tanpa ada penambangan pasir besi. Seolah-olah eksploitasi pasir besi di wilayah pesisir selatan adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga mengentaskan problem kesejahteraan di Kulon Progo. Disini WALHI menyadarkan masyarakat melalui kampanye dan diskusi akan bahaya penambangan pasir besi terhadap masyarakat karena bisa mengakibatkan bencana baik longsor, abrasi atau rusaknya lingkungan.

- b. Permasalahan dan advokasi kawasan Menoreh. Permasalahannya karena kawasan ini sebagai kawasan karst, selain rentan terhadap bencana longsor wilayah ini juga merupakan wilayah penyangga

benda cagar budaya yang terletak disekitar kawasan menoreh, salah satunya adalah Candi Borobudur yang termasuk 7 keajaiban dunia. Mengenai advokasi kebijakan melalui *public hearing* untuk Penolakan Pertambangan Marmer oleh PT. Margola dan penolakan Raperda pertambangan yang rencananya akan menetapkan kawasan ini sebagai kawasan tambang.

c. Permasalahan dan advokasi kawasan Perkotaan meliputi;

1). Penolakan BAQ (*Better Air Quality*) dan UAQi (program perbaikan kualitas udara perkotaan) yang didanai dari hutang luar negeri. Permasalahan yang timbul yaitu, penolakan rencana aksi nasional mengenai perbaikan kualitas udara dengan menggunakan dana pinjaman luar negeri. Disini WALHI menolak pemerintah untuk melakukan hutang ke luar negeri (demonstrasi dan kampanye).

2). Advokasi pencemaran sumur warga Sopen yang dilakukan PT Yogya Super Mall selaku pengelola Saphir Square Mall. Akibat bocornya sistem pembuangan limbah Saphir Mall pada bulan November 2005 yang lalu, sumur warga Sopen Yogyakarta menjadi tercemar dan tidak layak konsumsi. Advokasi yang dilakukan WALHI yaitu WALHI berupaya mendesak pemerintah memberi sanksi kepada para pencemar lingkungan untuk bertanggungjawab (memberi ganti rugi atau mengembalikan seperti semula). Selain itu WALHI melakukan investigasi

langsung ke daerah yang tercemar dan melakukan riset. WALHI mendampingi masyarakat untuk mendesak pihak saphir bertanggungjawab atas pencemaran yang telah dilakukan.

- 3). Advokasi untuk menjaga dan memulihkan kualitas-kuantitas air di kawasan perkotaan, mengenai buruknya kualitas dan kuantitas air. Advokasi yang dilakukan WALHI yaitu, WALHI mendesak pamerintah kota atau kabupaten untuk membuat beberapa regulasi yang konsisten menjamin rehabilitasi kualitas air dan sumber daya air agar tetap bersih, kembali bersih dan dapat diakses masyarakat dengan mudah.
- 4). Mendesak pemerintah untuk mengelola hal-hal yang dapat mencemari lingkungan, salah satunya adalah masalah sampah di kawasan perkotaan. Dalam kasus ini WALHI mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah di kawasan perkotaan, dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

d. Permasalahan dan advokasi Merapi meliputi;

- 1). Advokasi Penanganan Korban Erupsi Merapi, lambanya penanganan dampak erupsi oleh pemerintah dan masalah pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. WALHI mendesak dibuatnya kebijakan untuk menjaga masyarakat dari bencana, merespon ketika terjadi bencana dan yang berkelanjutan pada pasca bencana.

2). Pantauan Proses Kasasi TNGM (Taman Nasional Gunung Merapi). WALHI memberi pernyataan kepada Departemen Kehutanan RI dan jajarannya terkait sebagai wujud upaya WALHI dalam memantau proses kasasi di Mahkamah Agung.

2. Sedangkan solusi yang dilakukan oleh WALHI DIY dalam mengatasi hambatan terkait dengan advokasi bencana yaitu;

a. Hambatan yang dihadapi WALHI DIY dalam melakukan advokasi antara lain;

1). Advokasi di Kawasan Pesisir Selatan mengenai Kebijakan pemerintah yang dianggap salah atau merugikan masyarakat terkait proses advokasi, pemerintah cenderung menerapkan *“negativisme beaurocracy”*

2). Advokasi di Kawasan Menoreh yaitu Dalam proses advokasinya WALHI merasa terbatas karena dikeluarkannya izin pertambangan marmer dari pemerintah propinsi Jawa Tengah.

3). Advokasi di Kawasan Perkotaan Menyangkut kelemahan WALHI dalam konsistensi perencanaan program dengan pelaksanaannya, terkait pengelolaan sampah. Selain itu efektifitas WALHI masih rendah dalam pelaksanaan program pengorganisasian rakyat dan advokasi WALHI di berbagai daerah di perkotaan.

4). Advokasi di Kawasan Merapi Hambatan terbesar yang dirasakan oleh pihak WALHI DIY adalah birokrasi pemerintahan karena

dengan birokrasi yang berbelit-belit sedikit banyak berpengaruh terutama terkait dana, waktu dan tenaga yang digunakan WALHI.

- b. Solusi WALHI dalam menghadapi hambatan yang ada antara lain adalah dengan melakukan penguatan kapasitas SDM, penguatan manajemen kelembagaan dan melakukan komunikasi antara ED (Eksekutif Daerah) DIY dengan para anggota WALHI. Memandirikan / memberdayakan masyarakat, kembali fokus ke misi dan visi WALHI.

B. Saran

Dari hasil penelitian ada beberapa saran yang diajukan antara lain:

1. Perlunya WALHI DIY melakukan sinergi dengan berbagai pihak terkait dengan lingkungan hidup / *stakeholders* dalam melakukan advokasinya, baik pemerintah, masyarakat, dan WALHI sendiri.
2. Efektifitas pemberdayaan terhadap masyarakat korban bencana dilakukan secara terus-menerus yang sesuai dengan kearifan lokal serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga tepat sasaran.
3. Perlunya WALHI membentuk divisi khusus bencana alam dalam kepengurusannya sehingga bila terjadi bencana alam dan tindakan pencegahannya bisa cepat penangannya.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Suparlan ED (Eksekutif Daerah) WALHI DIY.

Wawancara dilaksanakan tanggal 18 Januari 2010 di Wahana Lingkungan Hidup, Nyi Pembayun, Kota Gede.

1. Program advokasi apa yang dilakukan WALHI tahun 2005

Suparlan: “Begini ya mbak, kita bekerja berdasarkan program yang telah ditetapkan, jadi untuk memilah advokasi yang dilakukan ke tahun kami agak sulit menjelaskan apalagi satu kasus belum tentu selesai dalam 1 tahun”.

2. Apa saja program advokasi WALHI selama 2005-2008?

Suparlan: “Pada intinya kami bekerja di 4 kawasan, dimana tiap kawasan bentuk advokasinya berlainan sesuai kebutuhan”.

3. Dimana sajakah kawasan advokasi WALHI?

Suparlan: “Kawasan merapi, kawasan menoreh, kawasan pesisir selatan dan kawasan perkotaan”.

4. Terkait bencana yang terjadi apakah WALHI bekerja hanya sesuai program atau lebih fleksibel?

Suparlan: “Secara teori kami berdasar program, tetapi jika ada bencana contohnya gempa 2006 secara otomatis fokus kami beralih ke penanganan bencana gempa”.

5. Jika terfokus pada gempa, bagaimana dengan program-program yang telah dibuat? Apakah tetap berjalan seiring ataukah ditunda?”

Suparlan: “Kami mengakui bahwa WALHI mengalami dinamika yang bisa dikatakan sedikit mengganggu program yang kami buat. Akibat terfokus pada gempa advokasi di kawasan-kawasan lain menjadi terbengkalai, ditambah lagi masalah internal WALHI sendiri.

6. Apa saja hambatan yang dihadapi WALHI?

Suparlan: “Hambatan itu pasti ada baik dari WALHI sendiri ataupun dari luar WALHI. Untuk lebih jelasnya silahkan baca data-data yang ada atau bertanya pada yang menangani evaluasi hasil kerja WALHI. Pada intinya hambatan terbesar berasal dari pemerintah, namun masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang kontra dengan kami juga ikut berpengaruh. Di samping itu WALHI merasa butuh sedikit perbaikan.

7. Bagaimana cara WALHI menghadapi hambatan tersebut?

Suparlan: “Untuk masalah WALHI, diadakan 3 cara yaitu dengan melakukan penguatan kapasitas SDM dan manajemen kelembagaan. Selain itu juga membuka / menjalin komunikasi antara ED WALHI DIY dengan para anggota WALHI.

8. Apa saja kasus-kasus yang menjadi advokasi WALHI?

Suparlan: “Secara global dari kawasan merapi terkait privatisasi sumber mata air, penambangan dengan alat berat, TNGM dan penanganan erupsi merapi. Di kawasan perkotaan cenderung ke AMDAL, sampah dan penghijauan terkait advokasi di kawasan selatan, advokasi yang dilakukan antara lain penolakan penambangan biji besi, amdal, dan penanganan korban gempa, sedangkan kawasan meroreh terkait longsor, pertambangan, dan air.

HASIL WAWANCARA

**Wawancara dengan Mas Umbu Wulang selaku Manager Kampanye (PSD)
WALHI DIY. Wawancara dilaksanakan tanggal 3 Februari 2010 di Wahana
Lingkungan Hidup, Nyi Pembayun, Kota Gede.**

1. Program advokasi apa yang dilakukan WALHI tahun 2005-2008

Umbu: “Sarasehan, *public hearing*, *trauma hilling*, penerbitan majalah/buletin, FGD, pelatihan-pelatihan dan pendidikan, diskusi.”

2. Apa tujuan diadakan advokasi?

Umbu: “Untuk memberdayakan masyarakat, mendampingi masyarakat, dan lingkungan agar tidak terjadi bencana akibat ulah manusia.”

3. Bagaimanakah cara melakukan advokasi?

Umbu: “Jalur ligitasi” dan “Jalur non ligitasi”

4. Apa saja hambatan dalam memberikan advokasi?

Umbu: “Masyarakat kurang memahami apa yang diajarkan WALHI, masyarakat gampang di hasut oleh pihak-pihak yang menyebut WALHI sebagai provokator / pengacau padahal WALHI sedang berusaha memperjuangkan hak masyarakat.”

5. Bagaimana solusi yang diambil WALHI untuk mengatasi hambatan yang ada?

Umbu: “WALHI menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha mendekati warga secara kekeluargaan.”

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Cholisin (2002). *Militer Dan Gerakan Pro Demokrasi Studi Analisis Tentang Respon Militer Terhadap Gerakan Pro Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana.

Dewanto, Kris. *Advokasi Kebijakan Publik*. Silabus : Lambaga Apikri.

Dharmawan, HCB, Ed. (2004). *LSM Menyuarakan Hati Nurani Rakyat Menuju Kesenjangan*. Jakarta : Kompas.

DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (2005). *Social Work : An Empowering Profession*. Boston : Allyn and Bacon.

Faisal, Sanapiah. (1995). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.

Fakih, Mansour. (2004). *Mayarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hiariej, Erick, dkk. Ed. (2004). *Politik Transisi Pasca Suharto*. Yogyakarta : Fisipol.

Husein, Ali Sofwan. SH. (1997). *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Khollis,Nur, *Statuta WALHI*. Tim Penyelaras Statuta, Palembang, 2006.

Miller,Valerie, *Pedoman Advokasi Perencanaan,Tindakan, dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Nawawi, Hadari. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sukasmanto, SE.M.Si. *Organisasi dan Manajemen*. Silabus : Lembaga Apikri.

Suparlan, *Panduan Advokasi Bencana*, Pustaka Hijau WALHI Yogyakarta, 2008.

2. MAJALAH ATAU BULETIN

Buletin Toe-Goe ; *Media Informasi Komunikasi Konsolidasi*, edisi 1, Yogyakarta 2006.

Buletin Toe-Goe ; *Media Informasi Komunikasi Konsolidasi*, edisi 2, Yogyakarta 2006.

Buletin Toe-Goe ; *Media Informasi Komunikasi Konsolidasi*, edisi 3, Yogyakarta 2006.

Buletin Toe-Goe ; *Media Informasi Komunikasi Konsolidasi*, edisi khusus, Yogyakarta 2006.

Buletin Toe-Goe ; *Suara Rakyat Dalam Wahana Lingkungan*, edisi khusus, Yogyakarta 2009.

Makalah Edi Suharto, PhD, 2006. *Filosofi Dan Peran Advokasi Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*.

3. KORAN ATAU SURAT KABAR

Tempo, Koran Media. 4 Mei 1991.

Kompas, Yogyakarta. Senin 10 Juni 2006.

KR (Kedaulatan Rakyat), Koran Media 17 Juli 2006.

4. WEBSITE

<http://www.screen-print-t-shirt-info/alfa-romeo-qtv-hatch.html/Strategi-Advokasi.Sunday August/28.2005>

http://www.walhi.or.id/Tahunan/Laporan_tahunan_walhi_2000_2001.htm

<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=162962&actmenu=50>

<http://ramlan.wordpress.com> atau [www. stiebinaniaga.ac.id](http://www.stiebinaniaga.ac.id) (di Jurnal, Artikel)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Mengenai_Dampak_Lingkungan)

<http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/06/05/brk,20090605-180208,id.html>

<http://www.walhijogja.or.id/rencana-tngm=dekati/titik-terang>.

<http://www.walhidiy.com> Penyelamatan Kawasan Pesisir dan Laut dari Intervensi Asing Jumat, 15 Mei 2009.